

## DAFTAR PUSTAKA

- A Chariri dan Imam Ghozali. (2018). *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Abdul Wahid Supriatna Mile, I. G. (2022). Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum*, 5(24072-361X), 323-328.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga
- DPRD, s. (2022, mei 19). Retrieved from Kabupaten Ciamis Meraih Opini WTP Ke Sembilan Kali: <https://setdprd.ciamiskab.go.id/2022/05/18/kabupaten-ciamis-meraih-opini-wtp-ke-sembilan-kali/>
- DPRD, S. (2022, mei 18). *DPRD Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciamis, Opini WTP Kab. Ciamis*. Retrieved from Kabupaten Ciamis Meraih Opini WTP Ke Sembilan Kali: <https://setdprd.ciamiskab.go.id/2022/05/18/kabupaten-ciamis-meraih-opini-wtp-ke-sembilan-kali/>
- Danang, Suntoyo. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika
- Dr. Syahril Effendi, S. M. (2021). *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Cv Batam Publisher.
- Fajri, R. (2022, juni 9). Retrieved 2022, from Temuan BPK RI, Ada Kekeliruan Anggaran Dinas Perhubungan Ciamis: <https://indodaily.co/temuan-bpk-ri-ada-kekeliruan-anggaran-dinas-perhubungan-ciamis/>
- Fardila Vezalin, D. S. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1693-3273 E-ISSN 2527-3469).

- Fitria, H. (2019). Analisis Realisasi Anggaran emerintah Daerah. Purwokerto: Cv IRDH.
- Hendry, Meisy dan Erinos, Erinos (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajamen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Manajemen Daerah Dan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Provinsi Sumatra Barat) Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2No. 1
- Holle, V. A. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi dan kualitas aparatur terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. *Akuntansi dan keuangan, 1*.
- I Gde Yoga Permana. SE., M. D. (2020). *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Zifatama Jawara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan- edisi revisi (2015). Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akademik Akuntansi YKPN Yogyakarta, 21*(1693-3273 E-ISSN 2527-3469), 1-14.
- Jaya, I. M. (2019). Accounting Treatment In Village Public Sector Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa. *Gorontalo Accounting Journal, 21*(P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN:2614-2066).
- M.Ali Fikri Biana Adha Inapty, R. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Ilmu Akuntansi, 9*(1979-858X;E-ISSN: 2461-1190).
- Maulita Dian, L. H. (2022). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

- Neneng Sri Suprihatin, A. A. (2019). pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Akuntansi Terpandu*, 12, 242-252.
- Papatungan, Maslinda. (2010). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Di Dinas Sosial Kabupaten Bolang Mongondow Timur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## **UNDANG-UNDANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (201

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah

